

**PERAN LEMBAGA NAGARI DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN
LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Program Studi Pemikiran Politik Islam*

Oleh :

HARJA WARDOYO
NIM. 44143001



**Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan
2018**

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang di tugas kan untuk membimbing skripsi
dari mahasiswa:

Nama : Harja Wardoyo
NIM : 44.14.3.001
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Peran Lembaga Nagari Dalam
Meningkatkan Pembangunan di Nagari
Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang
Kabupaten Pasaman Barat

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat dimunaqasyahkan

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Suheri Harahap, M. Si
NIP.197210131998031001

Dr.Zulkarnaen,MA
NIP.197401112003121006

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harja Wardoyo
NIM : 44143001
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Gading, 12 September 1994
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN- SU
Alamat : Jalan Bersama, Gang Saudara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

“PERAN LEMBAGA NAGARI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT”. Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka segala kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan

HARJA WARDOYO
NIM.44143001



Nama : Harja Wardoyo
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
Pembimbing I Suheri Harahap, M.Si
Pembimbing II Dr. Zulkarnaen, M.Ag

ABSTRAK

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan Pemerintahan terendah pengganti pemerintahan desa, Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom tumbuh dan berakar di Negeri ini dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan karakter watak masyarakat minang kabau, dibentuklah sebuah lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pembantu Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan serta dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut ialah lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Wali nagari merupakan yang bertindak sebagai badan eksekutif, Sedangkan badan legeslatif nagari dijabat oleh Bamus yang merupakan perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi seperti Pembuatan Peraturan Nagari. Lembaga terakhir adalah yudikatif, merupakan badan yang mengawasi pemerintahan. Didalam pemerintahan nagari yang menjadi badan pengawas ialah Kerapatan Adat Nagari. Jumlah penduduk mencapai 46.691 Jiwa tidak efektif jika hanya dilayani satu Nagari/Desa, maka pembangunan dapat dipercaya salah satu solusi yang dapat menangani masalah pelayanan yang tidak maksimal. Dari uraian diatas penulis mengadakan penelitian mengenai peran lembaga Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Rumusan masalah penelitian yang menjadi acuan penulis adalah "Bagaimana Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dengan metode siklus dari Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Informan penelitian adalah Wali Nagari Ujung Gading, Kepala Bidang Pembangunan Nagari Ujung Gading, Masyarakat Nagari Ujung Gading. Hasil dari penelitian yang di peroleh adalah pembangunan di Nagari Ujung Gading sangat menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Peran, lembaga Nagari, Pembangunan.

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Luas wilayah (KM ²) menurut Jorong di Nagari Ujung Gading	28
2. Batas Wilayah Nagari Ujung Gading	29
3. Orbitasi dan waktu tempuh.....	29
4. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Domisili Dikejorongan.....	30
5. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 2017.....	31
6. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	32
7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	32
8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	33
9. Sarana dan Prasarana Nagari.....	34
10. KepengurusanBamus.....	35
11. Kepengurusan KAN	35
12. Kepengurusan PKK.....	37
13. Kepengurusan LPMN.....	38
14. StandarOperasionalPelayananNagari Ujung Gading	50

KATA PENGANTAR

Assalamu A'alaikum....

Bismillahirrohmanirrohim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Karunia-NYA dan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan, dengan judul Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kesulitan dan keterbatasan kemampuan penulis. Namun dengan tekad kemauan yang kuat penulis dan bantuan dari berbagai pihak untuk selesainya skripsi ini. Maka untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Terutama kepada :

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda Masraida (Alm) tersayang yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada ananda tidak ada hentinya sampai saat ibunda mengembuskan nafas terakhirnya, dan kepada ayah ananda tercinta yang sangat kuat untuk menyekolahkan ananda mulai ananda SD samapai ananda Kuliyah tidak ada kata mengeluh dan menyerah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta jajarannya.

3. Bapak Drs. Muhammad Aswin M.Ap selaku ketua jurusan Pemikiran Politik Islam beserta jajarannya.
4. Bapak Suheri, M. Si selaku dosen pembimbing I penulis .
5. Bapak Dr. Zulkarnaen. MA selaku dosen pembimbing II penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen serta staf Administrasi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
7. Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Seluruh keluarga tercinta penulis, terutama kak Rita, kak Irda Yanti, bg Edia , kak Delli Yarti, kak Yasni Arti, dan adek ku tersayang Rahma Sari dan seluruh Abang-Abang Ipar dan kakak Ipar tak lupa buat anak dan keponakan ku.
8. Kepada sahabat ku Aufa Fikri S.sos dan sahabat ku Beni Mulia S.sos yang telah banyak membantu dan berjuang dengan saya.
9. Kepada orang yang tersayang Melisa Sinaga yang selalu di samping ku memberi semangat dan dukungan.
10. Kepada kawan-kawan di kampung dan sanak famili yang selalu memberi semangat dan dukungan yang sangat hebat
11. Kepada seluruh sahabat Se-Almamater dan sahabat dari pasaman Barat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Medan dan Sahabat dari Komunitas Mahasiswa Pasaman Barat Kota Medan(KOMPAsMEDAN)
12. Kepada seluruh rekan seperjuangan PPI-A , Addinul Huda Dauly, Evy Ermylayanti, Agung Aditama, Ida Royani Siregar, Iksan Faisal Angkat, Mardiana, Maulida Rahmi, M.Muiz Wira Munte, Muklis Hasibuan, Nurul

Qomariah, Rahmi Wardah Hasibuan, Reni Andriani, rida Putri Lidya, Sari fatimah Azzahra M, Sehatmen Al- akbar Hasibuan, Tamwirul Manar, Tomy Supratma Solin, Yayank Dwi Utari, Yuditia Sasmita.

Penulis sangat menghargai setiap masukan dan kritikan untuk perbaikan dan penyempurnaan Skripsi ini, kritikan yang membangun merupakan penambahan wawasan berpikir penulis untuk meneruskan khasanah pemikiran dalam tulisan selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini berm

Medan, Oktober 2018

Penulis,

Harja Wardoyo

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Masalah.....	5
1.4.Manfaat Penelitian	6
1.5.Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
2.1.Pengertian Peran.....	8
2.2.Lembaga Nagari	9
2.3.Pengertian Nagari.....	18
2.4.Prinsip-Prinsip Pembangunan	19
2.5.Konsep Perencanaan Pembangunan.....	23

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1.Jenis dan Sifat Penelitian	26
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3.Informan Penelitian.....	27
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5.Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1.Hasil Penelitian.....	31
4.1.1. Deskripsi Nagari Ujung Gading	31
4.1.2. Visi dan Misi Nagari	42
4.1.3. Struktur Organisasi	42
4.1.4.Tugas dan Fungsi Nagari	44
4.2Kontribusi-Kontribusi Pembangunan Nagari.....	54
4.2. Analisis.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran.....	64

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan Pemerintahan terendah pengganti pemerintahan desa, Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom tumbuh dan berakar di Negeri ini dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan karakter watak masyarakat minang kabau. Salah satu isi dari Perda nomor 10 tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Dalam Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 tahun 2016 tentang sistem pengelolaan pembangunan di jelaskan bahwa pengelolaan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama DewanPemerintah Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Nagari dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Nagari memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.¹

Pembangunan Nasional yang di laksanakan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang, merupakan usaha untuk dapat memperkecil keterbelakangan dan kemiskinan yang masih dirasakan sebagian rakyat Indonesia terutama masyarakat yang berdomisili di Pedesaan atau Nagari. Pemerintahan Nagari sebagai

¹*Perda Kab. Pasbar, No. 5, thn 2016*

pemerintahan terendah, dan dapat dikatakan sebagai pemerintahan terdepan di Sumatera Barat, merupakan pelaksanaan utama pemerintah dalam mendukung program-program otonomi daerah lokal, serta meningkatkan kualitas pemimpin nagari sebagai pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini menggambarkan dengan jelas betapa pentingnya peran dari seorang Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan serta mewujudkan nagarinya, karena Nagari berada di garis terdepan ataupun dengan kata lain berada pada posisi yang paling bawah yang berhubungan langsung dengan kelompok kecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa seorang Wali Nagari lebih mengetahui apa yang terjadi di dalam masyarakat daripada seorang presiden, karena Wali Nagari merupakan yang terdekat dengan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari, seperti halnya dalam sistem pemerintahan sebuah negara, dibentuklah sebuah lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pembantu Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan serta dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut ialah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wali nagari merupakan yang bertindak sebagai badan eksekutif, dan akan bertanggung jawab kepada masyarakat nagari yang disampaikan oleh Bupati melalui Camat, serta memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan (Bamus). Sedangkan badan legislatif nagari dijabat oleh Bamus yang merupakan perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berfungsi seperti Pembuatan Peraturan Nagari (Pernag) dan lain

sebagainya. Lembaga terakhir adalah yudikatif, merupakan badan yang mengawasi pemerintahan. Didalam pemerintahan nagari yang menjadi badan pengawas ialah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peran serta kerja sama ketiga lembaga tersebut sangat menentukan dalam keberhasilan sebuah Nagari dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Nagari, serta sinergi dan kerja sama antara lembaga nagari sangat penting demi mencapai visi dan misi Nagari.²

Dari penjelasan tersebut di atas dapat di kemukakan bahwa pembangunan Nagari dilaksanakan melalui prakarsadan pembangunan Nagari sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan serta lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Disamping itu dijelaskan pula bahwa pembangunan Nagari merupakan prioritas utama untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama bagi anggota masyarakat yang pendapatannya relatif rendah, yakni: buruh tani, petani, pengarab, nelayan, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat, menimbulkan dampak positif, seperti meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dengan demikian pembangunan perekonomian masyarakat Nagari Ujung gading hanya akan terwujud jika pelaksanaannya mencerminkan keterpaduan antara unsur pemerintah sebagai pembina dan pembimbing, sedangkan unsur masyarakat sumber daya, prakarsa, swadaya, dan partisipasi.

²Ibid, hlm. 10

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat”**.

1.2.Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terfokus.

Menurut Hatta Muhammad “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hatitentang kedudukan, kita tidak puas hanya meliahat saja melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam lagi”.³

Sedangkan menurut Winarno Surahmat mengatakan “Masalah adalah setiap kesulitan yang mengerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti di lalui dengan jalan semestinya apa bila kita akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan”.⁴

³Muhammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, (Jakarta 2004) hlm 65

⁴Winarso Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, (Bandung 2005) hlm 105

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bagaimana perbedaan pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan pembangunan di Nagari lain?
3. Apa saja peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?

1.3.Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai pemecahan masalah yang jelas, karena dengan tujuan penelitian ini dapat mempermudah arah penelitian dan mendapatkan manfaat yang diambil dari penelitian tersebut. Menurut Jujun Surya Sumantri. "tujuan penelitian adalah sebagai pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan di lakukan berdasarkan masalah yang akan di rumuskan".

Adapun tujuan penelitian ini adalah:⁵

1. Untuk mengetahui bagai mana peran lembaga Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagai mana hambatan lembaga Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai peran lembaga Nagari dalam meningkatkan pembangunan di nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dan menambah reperensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam khususnya bagi program Studi Pemikiran Politik Islam.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan mengali data yang berhubungan dengan peran lembaga Nagari Ujung Gading dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

⁵Jujun Surya Sumantri, *Filsafat Ilmu*, Sinar Harapan, (Jakarta 2002), hlm 313

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dari sisi *metologis*, tata cara mengungkapkan pemikiran seorang atau pandangan kelompok orang adalah menggunakan penelitian secara kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan di lakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang di dapat diamati.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian Peran

Menurut Miftah Thoha (2007:263), “suatu peran di rumuskan dalam suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang di timbulkan kaarena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan”.⁶

Menurut Lubis dan Husaini (1987:20), “untuk mengetahui suatu peran di gunakan pendekatan intergratif yaitu pendekatan gabungan yang mencakup input, proses, dan output.”⁷ Sedangkan menurut Soejono Soekanto (2012:212) menjelaskan pengertian peran berupa aspek dinamis kedudukan status”.⁸

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjelaskan suatu peran. Perbedaan antar kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak adaperan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran.

⁶Miftah Thoha, *Pemimpin dan kepemimpinan*, Gravindo Persada, Jakarta 2001, hlm 263

⁷Hari S.B Lubis dan Husaini Martani, *Teori Organisasi*, (Suatu Pendekatan Makro), Jakarta, 1987, hlm 20

⁸Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 212

Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola- pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat padanya.

Peran mencakup dalam tiga hal :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2.Lembaga Nagari

Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asiosasi. Perpedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya, yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya satu tujuan maka peraturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturan itu berorientasi pada suara pemenuhan kebutuhan sekunder, maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah lembaga. Perubahan dan perkembangan kelembagaan nagari-nagari di Indonesia di tentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal Nagari.

Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan. Kondisi internal adalah semua potensi dan akses Nagari yang dimiliki Nagari tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum. Perkembangan kelembagaan menjadi lebih baik setelah era pembangunan, dimana pemerintah melalui departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan Nagari. Perkembangan kelembagaan Nagari tersebut dalam penyelenggaraannya memiliki peranan yang sangat aktif di dalam Nagari hal ini dapat terwadahi dalam tiga lembaga:

a. Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari seperti yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari yakni Kepala Nagari dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Nagari memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan di suatu Nagari. Wali Nagari dipilih langsung oleh penduduk Nagari warga Negara Republik Indonesia yang sarat selanjutnya dan tata cara pemilihan naya diatur oleh peraturaaan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon wali Nagari yang memperoleh suara yang terbanyak dalam pemilihan Wali Nagari ditetapkan sebagai Wali Nagari. Pemilihan Wali Nagari dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisional sepanjang masa hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pemerintah Nagari adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Nagari, pemerintah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Nagari, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten.

b. Badan Permusawaratan Nagari (BAMUS)

Berdasarkan ketentuan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Badan Permusawaratan Nagari (BAMUS) berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah Nagari. Anggota BAMUS merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan BAMUS selama 6 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji. jumlah anggota BAMUS, paling sedikit 5 orang, dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Nagari. Keanggotaan BAMUS ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pimpinan Badan Permusawaratan Nagari terdiri atas 1(satu) orang ketua, 1(satu) orang wakil ketua, dan 1(satu) orang sekretaris. Pimpinan BAMUS dipilih oleh anggota BAMUS secara langsung dalam rapat BAMUS yang diadakan

secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BAMUS untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan di bantu oleh anggota termuda. BAMUS mempunyai hak:

1. Mengawasi dan memintak keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah Nagari kepada pemerintah Nagari.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari.
3. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
4. anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

Anggota BAMUS mempunyai hak:

1. Mengajukan usul rancangan peraturan Nagari.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan asal usul pendapat.
4. Memilih dan di pilih.
5. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja.

Anggota BAMUS mempunyai kewajiban:

1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan.

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan meninjau lanjuti aspirasi masyarakat.
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan menjaga kemasyarakatan Nagari.

Pimpinan dan anggota BAMUS dilarang:

1. Sebagai pelaksana proyek Nagari.
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok golongan masyarakat.
3. Melakukan korupsi, atau menerima uang.
4. Menyalah gunakan wewenang.
5. Melanggar sumpah atau janji.
6. Memutuskan perkara tanpa musawarah.
7. Melakukan proyek tanpa persetujuan Wali Nagari.
8. Membubuhkan stempel tanpa persetujuan Wali Nagari.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.(Q.S Ali imran: 159)⁹

a. Defenisi Kelembagaan

Dalam kajian sosiologi, istilah kelembagaan dapat dikatakan bahwa belum memperoleh pengertian yang tepat daan tergolong membingungkan menurut syahyuti mengemukakan¹⁰ ” kelembagaan menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat mantap yang hidap dikalangan masyarak”. Menurut Koentjaradiningrat¹¹ Pranata sosial

⁹ Menerangkan Tentang Musawarah, Q.S Ali Imron Ayat 195

¹⁰syahyuti, *Konsep Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 2006, hlm 20

¹¹Koentjaradiningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gremedia, Jakarta, 1974, hlm 56

adalah “pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada serangkaian aktivitas untuk memenuhi khusus mereka”.

Sesuai dengan defenisi di atas lembaga sosial dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salaah satu kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan untuk pembangunan desa. Lembagakemasyarakatan memiliki beberapa karakteristik di antaranya :

1. Tiap lembaga mempunyai tujuan utama.
2. Relatif permanen.
3. Memiliki nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.
4. Berbagai lembaga dalam masyarakat memiliki keterkaitan satu sama lain.

Ciri ciri umum lembaga masyarakat yaitu :

1. lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya.
2. Satu tingkatan tertentu merupakan ciri-ciri semua lembaga kemasyarakatan.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai arti dan tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat yang berguna untuk mencapai tujuan lembaga.
5. Lembaga juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan.
6. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis.

Hal ini harus diketahui adalah bahwa lembaga kemasyarakatan bukanlah suatu fenomena yang statis, lembaga ini bersifat dinamis dengan perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Mengingat fungsinya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tertentu anggota masyarakat, maka dinamikanya ditentukan juga oleh proses dan dinamikanya yang terjadi sebab, perubahan dan perkembangan akan mengakibatkan munculnya kebutuhan-kebutuhan baru dalam sendirinya situasi ini juga membentuk terjadinya lembaga baru untuk mencapai kebutuhan baru itu (Rahardjo:163).¹²

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)

Dalam upaya memperdayakan masyarakat di Nagari di bentuk Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), guna membantu pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugasnya meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan. Lembaga Pemerdaya Masyarakat Nagari adalah lembaga masyarakat di Nagari masyarakat sendiri dan untuk masyarakat dan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang diliputi aspek-aspek idiologi, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan an keamanan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan pembangunan atas dasar asas musawarah.

¹²Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm 163

2. Mengerakan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah.
3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Nagari.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) memiliki fungsi antara lain :

1. Sebagai wadah partisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
2. Menanamkan pengertian, penghayatan, dan pengalaman pancasila.
3. Mengali, memanfaatkan potensi dan mengerakan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
6. Meningkatkan peran wanita dan mewujudkan keluarga sejahtera.
7. -Membina dan mengerakan potensi pemuda untuk pembangunan.

Dari berbagai ungkapan diatas, sebagai lembaga yang tumbuh dari bawah memiliki potensi yang di miliki oleh Nagari, menumbuh kembangkan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan di Nagari. Peranan mengikuti norma

yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.

2.3 Pengertian Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pemimpin pemerintahannya.

Sedangkan yang menurut ahli yang di mana Soeroto (2005:20). mengemukakan bahwasanya Nagari adalah kesatuan keluarga yang lebih besar dari pada suku, Nagari juga biasanya terdiri dari lebih kurang dari 4 suku yaitu keluarga besar setali sedarah dari beberapa paruk menurut garis keturunan ibu, Pandangan mengenai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan kaitannya dengan Nagari.

Nagari menurut pemerintah Indonesia sama dengan desa seperti yang tertuang di UU No.6 tahun 2014, dengan demikian berikut berupa pandangan UU tentang desa yang berkaitan dengan Nagari di Sumatera Barat.¹³

1. Bahwa dalam UU no.6 tahun 2014 tentang desa terdapat 2 (dua) jenis desa, yaitu desa dan desa adat, sesuai dengan pasal 6.
2. Desa dan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya.

¹³*Undang-Undang, No.6, Tahun 2014*

3. Dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan terdapat di tetapkan desa adat, maka pemerintah provinsi (Sumatera Barat) atau kabupaten/kota memilih antara desa atau desa adat, sesuai penjelasan pasal 6 UU no. 6 tahun 2014 tentang desa.
4. Kalau pilihan penyelenggaraan pemerintahan terdapat ditetapkan desa adat , maka pemerintah provinsi di haruskan membuat peraturan daerah (Perda), sesuai pasal 109 UU no.6 tahun 2014 tentang desa.
5. Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat, bersifat geneologis matrilineal dan istoris dengan filsafat adat salingka nagari.
6. Maka, Nagari di kata gorikan sebagai desa adat, dan ini adalah suatu keistimewaan yang sudah di akui oleh konstitusi NKRI.

2.4.Prinsip-Prinsip Pembangunan.

Menurut AdiSasmita Rahardjo (2006) bahwa pembangunan Nagari merupakan seluruh pembangunan yang berlangsung di Nagari dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta di laksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong.¹⁴ Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari berdasarkan kemampuan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan Nagari/Desa mempunyai makna membangun masyarakat kenegarian dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas

¹⁴Adisasmita Rahdjo, Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm 123

bahwa pembangunan Nagari merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional.

Prinsip-Prinsip Pembangunan Nagari (Tjahja Supriatna, 1997:13) adalah :¹⁵

1. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat.
2. Dinamis dan berkelanjutan.
3. Menyeluruh, terpadu dan terkordinasi.

Adapun strategi dalam melaksanakan pembangunan Nagari :

1.Strategi pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksud untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapital penduduk, produktifitas, sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat Nagari.

2.Strategi kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk Nagari melalui pelayanan dan peningkatan program pembangunan sosial yang berkala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan

¹⁵Tjahja Supriatna, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta, 1997, hlm 13

pemukiman penduduk, pembuatan sarana dan para sarana sosial lainnya, seperti transportasi, pendidikan, tempat-tempat ibadah, dan fasilitas lainnya di Nagari.

3.Strategi tangkap terhadap kebutuhan masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejateraan yang di maksud untuk menanggapi kebutuhan yang di rumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar guna memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan akibat tidak tersedianya sumber daya itu di Nagari.Ketiga strategi pembangunan masyarakat Nagari memiliki kelemahan- kelemahan yaitu :

1. Kelemahan trategi pertumbuhan adalah semakin melebar pemisah antara kaya-miskin di Nagari.
2. Kelemahan strategi kesejateraan adalah justru menciptakan ketergantungan sangat kuat kepada pemerintah untuk memenuhinya.
3. Strategi integratif atau menyeluruh.

Strategi ini merupakan kombinasi dari tiga strategi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang meyangkut, kelangsungan pertumbuhan, Persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan Nagari.Strategi integratif ini secara struktural terlihat jelas pada unsur pendekatan.

Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejateraan, dan partisipasi aktif masyarakat Nagari yang berupa :

1. Sasarannya adalah membangun kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.
2. Fungsi lingkungan masyarakat yang beraneka ragam .
3. Dasar asumsinya adalah bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan dan bertujuan merestruksirasi hubungan kekuasaan dalam masyarakat, sementara birokrasi pusat yang desentralisasikan dapat memahami kekuatan kelompok masyarakat tersebut.

Dari berbagai strategi pembangunan yang dikemukakan untuk mencapai hasil yang dimaksud ditetapkan beberapa hasil, program pembangunan Nagari berawal dari pembangunan repelita pertama dengan berbagai program sebagai berikut :

1. Pembangunan pertanian.
2. Industrialisasi Nagari.
3. Pembangunan masyarakat Nagari terpadu.
4. Pembangunan pusat pertumbuhan.

Ada 3 (tiga) unsur utama yang perlu di perhatikan bagi keberhasilan pembangunan Nagari yaitu :

1. Keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Tumbuhnya gagasan-gagasan baru yang dilakukan masyarakat mengenal kehidupan mereka dimasa yang akan datang.
3. Diterapkan teknologi yang tepat guna dan padat karya.

ولا تطيعو امر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون

Artinya: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. (Q.S. Assu'ara: 151-152).¹⁶

2.5. Konsep Perencanaan Pembangunan

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.6 2014 tentang Nagari¹⁷, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan para sarana Nagari, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Nagari meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Nagari sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurus utama pembangunan dan keadilan sosial. Pentingnya perencanaan pada setiap pembangunan. Dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak dalam pelaksanaannya agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahannya untuk pelaksanaan

¹⁶Q.S. Assu'ara Ayat 151-152

¹⁷Undang-Undang, No.6, Tahun 2014, Pasal 78, ayat 1 dan 2

pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan yakni :

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa.
4. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang lebih baik secara efektif dan efisien.

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan Nagari sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan Nagari merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, dengan pembinaan serta pengawasannya dilakukn oleh pemerintah, jadi dengan proses pembangunan seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Nagari dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah.

Musawarah merupakan salah satu asas dasar Negara Indonesia. musawarah pembangunan yang diadakan oleh pemerintah Nagari disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Nagari. Musrembang Nagari dalam penjabarannya tentang Penduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari tahun 2008 adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrembang Nagari dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan Nagari dengan mengacu/ memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah Nagari (RPJM Nagari) yang disusun.

Musrembang yang bermakna akan membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan Nagari, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dalam Nagari maupun dari luar Nagari. Musrembang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Nagari bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrembang merupakan salah satu tugas pemerintah Nagari untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.

Musrembang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan di Nagari, oleh karena itu tanpa Musrembang pembangunan di Nagari akan terbengkalai dan tidak berjalan lancar sehingga pembangunan di Nagari tidak selesai dengan apa yang diinginkan pemerintah dan masyarakat Nagari tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis

Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif, yang dimana kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono 2014:9).¹⁸ Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna . Jenis penelitian kualitatif juga disebut penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan.

b. Sifat

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat deskriptif, yang dimana deskriptif akan mendiskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Peneliti mendiskripsikan bagai mana Peran Lembaga Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dengan maksud memahami realita yang ada.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 9

3.2.Lokasi dan Waktu penelitian

lokasi yang akan digunakan untuk penelitian adalah kantor Nagari Ujung Gading, sedangkan waktu yang akan digunakan untuk meneliti adalah Agustus-september 2018.

3.3.Imforaman Penelitian

Untuk memperlancar penelitian dan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat maka peneliti menetapkan informan yang peneliti gunakan yakni :

1. Informan Kunci : Wali Nagari Ujung Gading
2. Informan utama : Kaur Pembangunan Nagari Ujung Gading
3. Impormasi tambahan : Masyarakat Nagari Ujung Gading

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Menurut Gulo (2002:110)¹⁹ pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai suatu tujuan dalm penelitian. Adapun secara garis besar tujuan penelitian ini adalah menemukan jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tetapkan sebelumnya, untuk mendapatkan jawaban tersebut maka peneliti memerlukan data atau informasi yang diperoleh melalui tahap pengumpulan data. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan sehingga mendapatkan informasi tau data yang akurat dan jelas, maka penulis menggunakan beberapa cara teknis pengumpulan data yaitu :

¹⁹Gulo w, *Metode Penelitian*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 110

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan keterangan dari buku-buku, media masa, jurnal, dan karya ilmiah. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperluas dan memperdalam cakrawala pemikiran dan untuk menentukan teori-teori yang mendukung penelitian lapangan ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu Kantor Nagari Ujung Gading, untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Observasi

Sebagai teknik pengumpulan data, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap unsur yang tampak terhadap suatu gejala pada objek penelitian. Unsur yang tampak dinamakan dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Teknik ini dipakai untuk mengamati secara langsung keadaan langsung dilapangan agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2.Wawancara

Merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dimana pewawancara bisa menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan mendalam untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang diperlukan dengan baik dan benar.

3.Dokumentasi

Teknik ini merupakan suatu cara pengumpulan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti supaya dapat digunakan sebagai asas bagi suatu kejadian dan penghasilan sesuatu terbitan serta aturan suatu lembaga masyarakat.

3.5.Teknik Analisis Data

Suatu penelitian sangat dibutuhkan analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah teknis analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Yang dimana terdiri dari :

1. Rediksi data, yaitu data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terrinci. Laporan

dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian data, yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara), dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.
3. *Conclusion/verification*, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan dari peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Nagari Ujung Gading

Kantor Wali Nagari Ujung Gading terletak di Jalan Nusantara Barat Jorong Pasar Lama terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas bangunan lantai 1 (satu) ± 15 x 8 M dan lantai 2 (dua) ± 12 x 8 M. Pelaksanaan kegiatan di Kantor Wali Nagari Ujung Gading dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at dan jam masuk kantor adalah mulai jam 7.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB. Kegiatan di kantor Wali Nagari Ujung Gading selalu diawali dengan apel setiap hari dan pada hari Selasa diikuti oleh seluruh Kepala Jorong dan pada hari Jum'at diikuti oleh seluruh Da'i Nagari.²⁰

A. Aspek Geografi

1. Luas Wilayah

Nagari Ujung Gading adalah satu-satunya Nagari di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dan terdiri dari 16 Jorong, yang dimana luas wilayah Nagari Ujung Gading 263,77 KM² atau 6,78% dari Luas Kabupaten Pasaman Barat. Luas masing-masing Jorong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

²⁰ *Profil Nagari Ujung Gading, tahun 2018, hlm. 12*

Tabel 1: Luas wilayah (KM²) menurut Jorong di Nagari Ujung Gading

No	Jorong	Luas (KM ²)	Persen
1	Batang Gunung	7.37	2.79
2	Brastagi	1.31	0.49
3	Irian	0.44	0.16
4	Koto Pinang	3.23	1.23
5	Koto Sawah	26.41	10.01
6	Kuamang	12.63	4.79
7	Lombok	0.25	0.09
8	Lubuk Alai	16.06	6.09
9	Pasar Lamo	0.41	0.16
10	Ranah Salido	13.64	5.17
11	Saroha	4.72	1.79
12	Situak	70.46	26.71
13	Situak Barat	86.87	32.93
14	Taluok Ambun	0.98	0.37
15	Tampus	18.83	7.14
16	Tanjung Damai	0.16	0.06
Jumlah		263.77	100

Sumber Data: Isian Monografi Nagari Ujung Gading Tahun 2017

2. Letak dan Kondisi Geografis

Nagari Ujung Gading terletak pada 00⁰ 33' LU - 00⁰ 05' LU dan 99⁰ 28' BT - 99⁰ 42' BT dengan batas daerah

Tabel 2: Batas Wilayah Nagari Ujung Gading

Letak Batas	Wilayah
Sebelah Utara	Tapanuli selatan, PT Pasaman Marama Sejahtera
Sebelah Selatan	Nagari Sungai Aua
Sebelah Barat	Nagari Parit
Sebelah Timur	Nagari Sungai Aua

Sumber Data: Isian Monografi Nagari Ujung Gading Tahun 2017

Sedangkan jarak tempuh Nagari Ujung Gading, dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3: Orbitasi dan waktu tempuh

No	Orbitasi dan waktu tempuh	Keterangan
1	Jarak Ke Ibu Kota Provinsi	225 Km
2	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten	49 Km
3	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan	0,25 Km
4	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi	5 Jam
5	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten	1 Jam
6	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan	0,12 Jam

Sumber Data: Isian Monografi Nagari Ujung Gading Tahun 2017

B. Aspek Demografi

Penduduk adalah aspek utama dalam pembangunan, jumlah penduduk juga merupakan syarat utama untuk pemekaran wilayah. Penyebaran penduduk pada suatu wilayah menunjukkan suatu potensi atau permasalahan pada wilayah tersebut, penambahan penduduk disebabkan oleh kelahiran juga adanya perpindahan penduduk yang datang ke Nagari Ujung Gading

Tabel 4: Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Domisili Dikejorongan

NO	Nama Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1	BATANG GUNUNG	1072	1079	2151
2	BRASTAGI	2114	2098	4212
3	IRIAN	997	983	1980
4	KOTO PINANG	1481	1479	2960
5	KOTO SAWAH	2978	2956	5934
6	KUAMANG	2128	2109	4237
7	LOMBOK	1193	1202	2395
8	LUBUK ALAI	1218	1204	2422

9	PASAR LAMA	1493	1485	2978
10	RANAH SALIDO	1229	1221	2450
11	SAROHA	1213	1221	2434
12	SITUAK	1382	1347	2729
13	SITUAK BARAT	1324	1328	2652
14	TALUAK AMBUN	1839	1852	3691
15	TAMPUS	1416	1387	2803
16	TANJUNG DAMAI	1148	1154	2302
JUMAH		24225	24105	48330

Sumber Data: Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Ujung Gading Tahun 2018²¹

a..Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Nagari Ujung Gading menurut klasifikasi umur pada tahun 2017 dari umur 0-75 tahun, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 5: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 2017

No	Kelompok Umur (Thn)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	3105	2909	6014
2	5-9	3069	3115	6142
3	10-14	2950	3035	5989
4	15-19	2448	2333	4781
5	20-24	1702	1704	3408
6	25-29	1826	1856	3682
7	30-34	1574	1706	3280
8	35-39	1468	1467	2935
9	40-44	1253	1265	2518
10	45-49	1062	1120	2182
11	50-54	947	1022	1969
12	55-59	652	663	1315
13	60-64	372	382	724
14	65-69	263	371	634
15	70-74	167	286	453
16	≥75	198	384	579

Sumber Data: Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Ujung Gading Tahun 2018

²¹ Ibid. hlm 17

b. Penduduk Menurut Agama dan Menurut Mata Pencaharian

Nagari Ujung Gading pada umumnya memiliki homogenitas penduduk jika dilihat dari segi agama, walaupun mayoritas penduduk beragama islam namun keharmonisan antara penduduk tetap terjaga dan jauh dari isu SARA yang dapat memecah keharmonisan antara masyarakat. Adapun jumlah penduduk menurut agama sebagai berikut:

Tabel 6: Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Islam	23725	23666
2	Kristen	3	5
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber Data: Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Ujung Gading Tahun 2018

Sedangkan penduduk dengan mata pencaharian yang berbeda, dengan iklim yang tropis sangat bagus dengan pertanian, adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian seperti tabel dibawah ini:

Tabel 7: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	1011
	b. ABRI	24
	c. Polisi	24

	d. BUMN	166
	e. Swasta	2344
2	Wiraswasta	616
3	Tani	11720
4	Pertukangan	458
5	Buruh Tani	5040
6	Pensiunan	1168
7	Nelayan	16

Sumber Data: Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Ujung Gading Tahun 2018

c. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 8: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1680
2	Sekolah Dasar	13188
3	SLTP	13471
4	SLTA	3002
5	Akademi (D1-D3)	1080
6	Sarjana (S1-S2)	1226

Sumber Data: Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Ujung Gading Tahun 2018

C. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang proses percepatan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan, adil dan makmur maka diperlukan beberapa sarana dan prasarana, dengan rincian sebagai berikut

a. Sarana pendidikan

Dari beberapa indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa satu diantaranya adalah tingkat pendidikan penduduk. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jangkauan

pelayanan pendidikan di Nagari Ujung Gading dapat dilihat dari jumlah sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan tingkat dan penyebarannya

b.Sarana kesehatan

Sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut.

c.Sarana Ibadah

Pada tahun 2018 sebaran sarana ibadah di Nagari Ujung Gading yang di mayoritas masjid, masjid hampir ada setiap kejurongan, selainkan masjid mushola juga ada di Nagari Ujung Gading.

Adapun data dari sarana dan prasarana yang ada di Nagari Ujung Gading pada tahun 2018, seperti yang ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 9: Sarana dan Prasarana Nagari

No	Jenis Prasarana dan Sarana Nagari	Jumlah
1	Kantor Nagari	1
2	Gedung SLTA	8
3	Gedung SLTP	12
4	Gedung SD	25
5	Gedung MI	4
6	Gedung TK	19
7	Masjid	52
8	Musholla	15
9	Pasar Nagari	1
10	Polindes	16
11	Panti PKK	-

12	Poskamling	16
13	Jembatan	7
14	Gedung TPQ	-

Sumber Data: Isian Monografi Nagari Ujung Gading Tahun 2017

D. Kelembagaan Nagari Ujung Gading

a. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Adapun kepengurusannya ialah:

Tabel 10: Kepengurusan Bamus

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. Ahmad Syahrin
2.	Wakil Ketua	Wafrihan Zani
3.	Sekretaris	Silvianti, S. Psi.I
4.	Anggota	Drs. H. Zulfakhri
5.	Anggota	Hendra Warta
6.	Anggota	Firman
7.	Anggota	Safran
8.	Anggota	Riswandi
9.	Anggota	Sapdanur
10.	Anggota	Julianto
11.	Anggota	Nurbaiti
12.	Anggota	Safrida

b. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

KAN adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat, yang dimana KAN dipimpin oleh H. Antonius, SH.MH. Adapun kepengurusannya ialah:

Tabel 11: Kepengurusan KAN

No.	Nama	Gelar Adat	Jabatan
1.	H. Antonius, SH	Pucuk Adat Tuanku Sati	Ketua KAN
2.	H. Sutarman	Sutan Majalelo	Wakil Ketua I
3.	Sapdanur	Datuk Rajo Sampono	Wakil Ketua II
4.	Hendra Warta	Bosa Rajo Todung	Sekretaris
5.	Drs. H. Mirzan Azin	Datuk Rajo Kinaya	Bendahara
6.	Baromsyah	Datuk Rajo Sordang	Anggota
7.	Darmawi	Datuk Gompo Rayo	Anggota
8.	Julianto	Datuk Gompo Rayo	Anggota
9.	Agusman	Datuk Kompek Suku	Anggota
10.	Badri	Datuk Rajo Kinaya	Anggota
11.	Marwan	Datuk Rajo Kinaya	Anggota
12.	Drs. H. Ahmad Syahrin	Datuk Rajo Kinaya	Anggota
13.	Indra Syamsu	Datuk Kocik	Anggota
14.	Maslan Haris	Datuk Rajo Sampono	Anggota
15.	Sahron , ST	Datuk Mangkuto Sati	Anggota
16.	Sahri Efendi	Datuk Rangkayo Mudo	Anggota
17.	Basran	Rajo Rantau pinang	Anggota
18.	Yulherman	Bosa Rajo Mangatas	Anggota
19.	Sulpan	Bosa Rajo Lenggang	Anggota
20.	Saiful, AM	Sutan Majalelo	Anggota
21.	Tarjani	Penghulu	Anggota
22.	Taufik Batubara	Penghulu	Anggota
23.	Taufik	Penghulu	Anggota
24.	Agus Salim	Penghulu	Anggota
25.	Aidil Hadiri	Penghulu	Anggota
26.	Dahnial, S. Pd	Penghulu	Anggota
27.	Pajri	Penghulu	Anggota
28.	Irsan	Penghulu	Anggota
29.	H. Padri, S. Pd. MH	Penghulu	Anggota
30.	H. Bartahan	Penghulu	Anggota
31.	Sayfrizal	Penghulu	Anggota
32.	Ruston	Penghulu	Anggota
33.	Bukhori	Penghulu	Anggota
34.	Syukur Lubis	Pucuk Adat Situak-St. Baramal	Anggota
35.	Zul Arham	Penghulu	Anggota
36.	Sofyan	Penghulu	Anggota
37.	H. Kholid Nst	Penghulu	Anggota
38.	Abdul Karim	Penghulu	Anggota
39.	Abdul Rifa'i	Penghulu Rajo Panjang	Anggota

40.	Damri	Penghulu	Anggota
41.	H. Syukron	Penghulu	Anggota
42.	Misnan	Penghulu	Anggota
43.	Marwasi	Penghulu	Anggota
44.	Hamzar	Penghulu	Anggota

c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memperdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK Nagari Ujung Gading dipimpin istri bapak Wali Nagari Ujung Gading, yaitu Hj. Darmi Burhanuddin. Z. Adapun kepengurusannya ialah:

Tabel 12: Kepengurusan PKK

No.	Nama	Jabatan
1.	Darmi Burhanuddin	Ketua
2.	Yumelda Padri	Wakil Ketua
3.	Novita,S. Hum	Sekretaris
4.	Lisma Hayati, SE	Wakil Sekretaris
5.	Misykah, S. Si	Bendahara
6.	Khahiroh, SE	Wakil Bendahara
7.	Dra. Afwanil Husni	Anggota
8.	Hj. Yuharnis	Anggota
9.	Harianis	Anggota
10.	Hj. Suryati	Anggota
11.	Laila Hanum	Anggota
12.	Hj. Aida Eliza	Anggota
13.	Hj. Sastra Wati	Anggota
14.	Rosalina Sitra .S	Anggota
15.	Irna Yusnita	Anggota
16.	Dania	Anggota
17.	Aniarti	Anggota
18.	Juliarna	Anggota
19.	Murni	Anggota
20.	Syafrida	Anggota
21.	Erlis	Anggota

22.	Silvianti, S. Psi, I	Anggota
23.	Ismar Laila	Anggota
24.	Hj. Ernawati	Anggota
25.	Nila Yati	Anggota
26.	Gusniarti	Anggota
27.	Lili Andriani, SE	Anggota
28.	Tri Astuti, S. Km	Anggota
29.	Erita Nova	Anggota
30.	Defni	Anggota
31.	Hasanah	Anggota
32.	Desi Eka Putri	Anggota
33.	Firna Wati	Anggota
34.	Radma	Anggota

d. Bundo Kanduong

Secara harfiah bundo kanduang berarti ibu sejati atau ibu kandung tetapi secara makna bundo kanduang adalah pemimpin wanita di minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang membuat adat minangkabau lestari semenjak zaman sejarah minanga tamwan hingga zaman adat minangkabau. Istri seorang datuak kadang-kadang juga disebut sebagaibundo kanduang untuk level klan/ suku. Bundo Kanduong Nagari Ujung Gading dipimpin oleh Hj. Nurbaiti

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang ada di Nagari. LPMN Ujung Gading dipimpin oleh Fitriani. S.Si. Adapun Kepengurusannya ialah:

Tabel 13: Kepengurusan LPMN

No.	Nama	Jabatan
1.	Fitriani	Ketua
2.	M. Amir Lubis, A. Md	Sekretaris
3.	Khariroh, SE	Bendahara
4.	Lestarida	Anggota

4.1.2. Visi dan Misi Nagari Ujung Gading

Visi : “terwujudnya pelayanan prima, sejahtera, tertib, aman dan bersih dalam kebersamaan”

Misi :

- a. Mempercepat segala bentuk pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Pengembangan pasar nagari dan koperasi sebagai badan usaha milik nagari.
- c. Pelarangan hiburan malam dan pemberantasan penyakit masyarakat.
- d. Mewujudkan masyarakat yang religious.
- e. Pengendalian sampah pasar dan sampah warga.

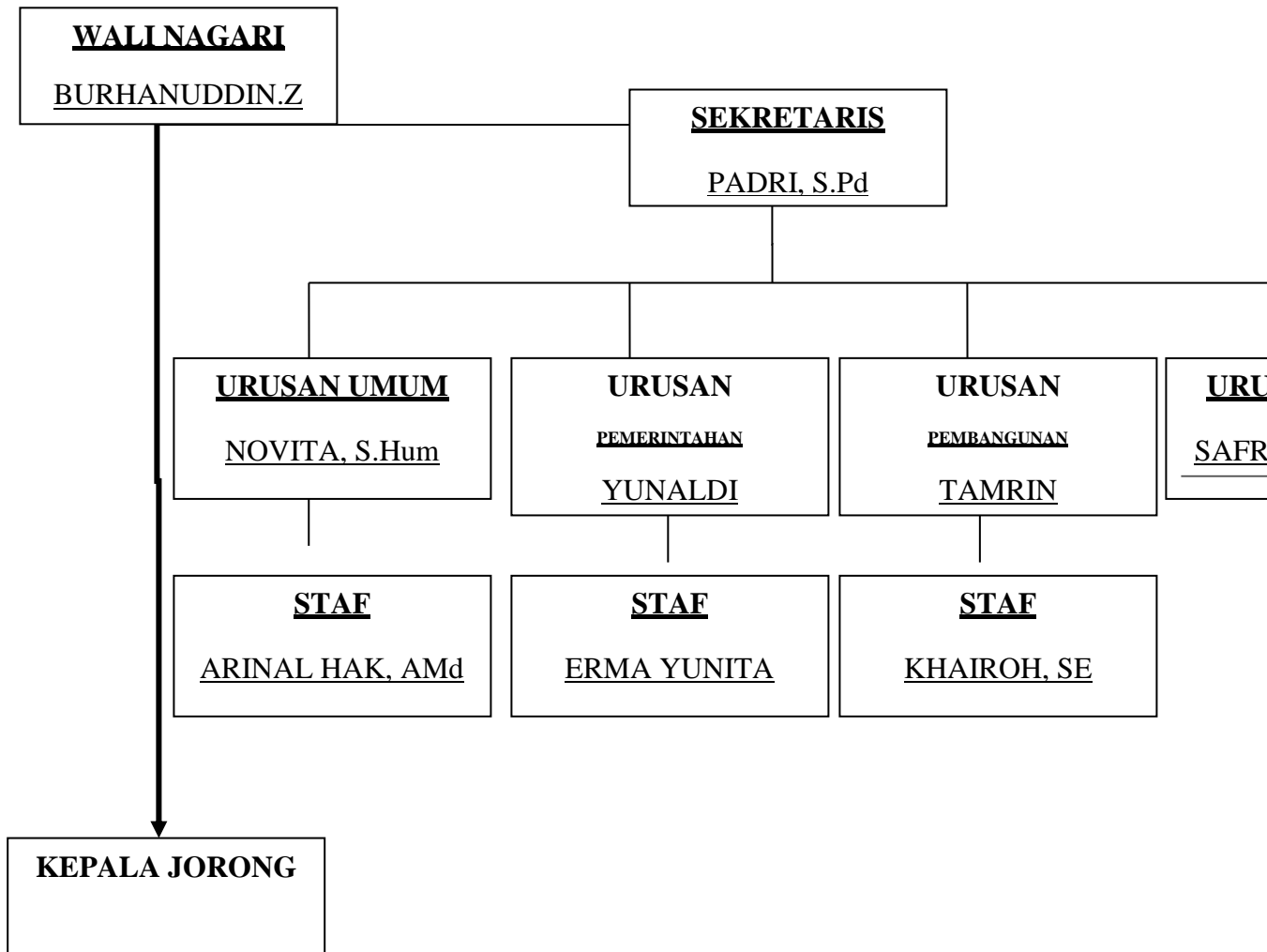
4.1.3. Struktur Pemerintahan Nagari Ujung Gading

Adapun yang menjadi struktur pemerintahan Nagari Ujung Gading seperti yang ada pada bagan di bawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH NAGARI UJUNG GADING

PERNA No. 4 Tahun 2012



4.1.4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Nagari Ujung Gading

1. Wali Nagari, mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan termasuk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Nagari

Uraian Tugas tersebut meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga sendiri
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat Gotong Royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan Nagari
- c. Menggerakkan partisipasi masyarakat di Nagari
- d. Mengkoordinir dan mengoptimalkan pemungutan Sumber Pendapatan Nagari, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
- e. Melaksanakan tugas perbantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah
- f. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga-lembaga yang ada di Nagari untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan

- h. Melaporkan perkembangan jumlah penduduk Nagari (kelahiran, Pindah dan Meninggal Dunia) setiap bulannya
 - i. Memelihara dan memanfaatkan asset pemerintah Nagari dan Asset Pemerintah Daerah yang ada di Nagari
 - j. Melaksanakan Urusan Pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi
 - k. Melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Nagari
 - l. Memelihara kelestarian Adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam Nagari bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan prinsip kemitraan dan saling menghormati fungsi serta peranan masing-masing
 - m. Melaksanakan Peraturan Nagari (PERNA) yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari.
2. Sekretaris Nagari, mempunyai tugas menjalankan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari
- Uraian tugas tersebut meliputi :
- a. Mengatur dan mendistribusikan surat-surat kepada Kepala Urusan sesuai bidang tugas dan permasalahannya serta melaksanakan rapat-rapat kerja Wali Nagari dengan Perangkat Nagari dan rapat-rapat Nagari lainnya.

- b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat Pemerintahan Nagari baik secara langsung maupun berkala agar terjadi hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- c. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan.
- d. Melaksanakan urusan Rumah Tangga, Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- e. Melaksanakan pembinaan, inventarisasi dan penyimpanan data-data Pegawai
- f. Mengkoordinasikan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian data untuk merumuskan program kerja dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Nagari.
- h. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian serta pelaporan anggaran pendapatan dan belanja nagari setiap tahunnya.
- i. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya.
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Wali Nagari untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Nagari kepada Wali Nagari secara berkala sebagai pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN) Wali Nagari setiap tahunnya.

3. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas, menyelenggarakan administrasi umum, tata usaha kearsipan, pengelolaan tentang kekayaan nagari, serta menyiapkan rapat dan laporan.

Uraian tugasnya meliputi :

- a. Pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
 - b. Pelaksanaan pencataan inventaris kekayaan nagari.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor.
 - e. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan perkantoran.
 - f. Pengelolaan administrasi perangkat nagari.
 - g. Pengarsipan bahan-bahan laporan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas Pemerintahan Nagari.
4. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintahan Nagari dalam bidang tata usaha Pemerintahan Nagari dan pelayanan umum.

Uraian tugas tersebut meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Kaur Pemerintahan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

- b. Melaksanakan dan mengelola administrasi pemerintahan, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan memberikan pelayanan rekomendasi pembuatan sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan.
- c. Melayani dan mengelola perizinan keramaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan yang meliputi penyusunan data kependudukan, mutasi penduduk, pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat pindah domisili, data penduduk dan lain-lain.
- e. Melakukan analisa dan mempersiapkan konsep kebijakan Pemerintah Nagari dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.
- f. Mengkoordinir dan mengoptimalkan pengelolaan dan perwujudan sumber pendapatan Nagari dalam bentuk PBB, pajak retribusi serta pendapatan lainnya.
- g. Melaksanakan pengelolaan kekayaan Nagari yang meliputi tanah kas nagari, hutan nagari, barang inventaris nagari dan kekayaan milik nagari.
- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pelaksanaan hubungan antar lembaga-lembaga dalam Pemerintahan Nagari serta lembaga lainnya di nagari.
- i. Menyiapkan rancangan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.
- j. Menyiapkan dan memberikan pelayanan hukum atas permasalahan hukum terhadap Pemerintahan Nagari.

- k. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan sosial politik di Nagari.
 - l. Menyiapkan rancangan kerja sama Nagari dengan berbagai lembaga serta para perantau.
 - m. Mengkoordinir dan mengelola administrasi ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari.
 - n. Melakukan pelayanan umum yang menyangkut urusan tata pemerintahan.
 - o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Wali Nagari dan Sekretaris Nagari untuk pembinaan dan peningkatan tugas lebih lanjut.
 - p. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari secara berkala sebagai pertanggungjawaban kerja.
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Nagari atau Sekretaris Nagari untuk kelancaran tugas Pemerintahan Nagari.
5. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintahan Nagari dalam bidang administrasi, pembangunan dan perekonomian

Uraian tugas tersebut meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Melaksanakan administrasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaporan

- c. Menyiapkan bahan dalam rangka merumuskan usaha-usaha pembinaan peningkatan pembangunan dan partisipasi masyarakat bersama-sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN).
- d. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan dan peningkatan potensi produksi nagari dibidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan.
- e. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan dan peningkatan usaha-usaha perdagangan, industri dan usaha ekonomi lainnya.
- f. Melaksanakan inventarisasi dan data usaha kelompok-kelompok ekonomi yang ada di Nagari.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan pembinaan sarana perekonomian di Nagari yang meliputi lumbung pith nagari, badan perkreditan rakyat, simpan pinjam, koperasi nagari dan badan usaha milik nagari.
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka menjajaki dan peningkatan hubungan kerja sama dalam rangka peningkatan perekonomian nagari.
- i. Melaksanakan usaha-usaha promosi nagari dalam rangka penanaman modal di Nagari.
- j. Melaksanakan pelayanan dan rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian.
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Wali Nagari dan Sekretaris Nagari untuk pembinaan dan peningkatan tugas lebih lanjut.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nagari dan atau Sekretaris Nagari.

6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintahan Nagari dalam bidang administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

Uraian tugas tersebut meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dengan berpedoma kepada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Meghimpun, mengolah dan menyiapkan data dalam rangka penyusunan konsep kebijakan pembinaan kesejahteraan rakyat, sosial dan kebudayaan nagari yang meliputi pembinaan mental dan spiritual pembinaan generasi muda dan olah raga.
- c. Menyiapkan data dalam rangka pelaksanaan bimbingan sosial, pemberian bantuan sosial, pembinaan kenakalan remaja dan penyakit sosial lainnya.
- d. Melakukan pelayanan administrasi surat nikah, surat keterangan sehat dan surat keterangan miskin.
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi pelayanan haji, pemantauan dan pembinaan kehidupan beragama.
- f. Mengkoordinasikan pemantauan dan usaha-usaha penanggulangan awal musibah dan bencana alam yang terjadi dilingkungan nagari.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka membina peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat nagari.

- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan di nagari.
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah kesejahteraan sosial.
- j. Melaksanakan upaya fasilitasi pembinaan generasi muda, kegiatan olah raga serta masalah tenaga kerja.
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Wali Nagari dan Sekretaris Nagari untuk pembinaan dan peningkatan tugas lebih lanjut.
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari secara berkala sebagai penanggung jawab kerja.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas Pemerintahan Nagari.²²

H. Standar Operasional Pelayanan (SOP) Nagari Ujung Gading

Prosedur standar waktu pelayanan, syarat-syarat pelayanan, dan biaya pengurusan dokumen di Kantor Nagari Ujung Gading. Adapun daftar rincian standar operasional pelayanan sebagai berikut:

Tabel 14: Standar Operasional Pelayanan Nagari Ujung Gading

N o	Jenis pelaya nan	Persyaratan	Waktu	Biaya	Keterangan
1	Surat Pengantar	1. Foto copy Kartu	30 Menit	Gratis	Proses dilanjutkan

²² *Isian Monografi Nagari Ujung Gading Tahun 2017, hlm 19*

	Pengurusan KTP	<ul style="list-style-type: none"> 2. Keluarga 2. Permohonan KTP 3. Surat pengantar dari Kepala Jorong (Kepala Lingkungan) 			oleh yang bersangkutan ke kantor kecamatan
2	Surat Pindah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan domisili dari Kepala Jorong (Kepala Lingkungan) 2. KTP asli 3. Kartu Keluarga asli 	30 menit	Gratis	Proses dilanjutkan oleh yang bersangkutan ke kantor kecamatan
3	Surat Pengantar pembuatan akte kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan lahir dari bidan 2. Foto copy surat nikah orang tua 3. Foto copy KTP orang tua dan 2 orang saksi 4. Foto copy Kartu Keluarga 5. Surat keterangan Kepala Jorong (Kepala Lingkungan) 	30 Menit	Gratis	Proses dilanjutkan oleh yang bersangkutan ke kantor pemerintahan Kabupaten
4	Surat Keterangan Kurang mampu	Surat Pengantar Kepala Jorong (Kepala Lingkungan)	30 Menit	Gratis	
5	Surat keterangan	Surat pengantar Kepala Jorong	30 Menit	Gratis	Proses dilanjutkan

	meninggal dunia	(Kepala Lingkungan)			oleh yang bersangkutan ke kantor pemerintahan Kabupaten
6	Surat Keterangan Ahli Waris	Surat pengantar Kepala Jorong (Kepala Lingkungan)	30 Menit	Gratis	
7	Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Musholla/ Masjid	Surat Pengantar Kepala Jorong (Kepala Lingkungan)	30 Menit	Gratis	Proses dilanjutkan oleh yang bersangkutan ke kantor kecamatan
8	Rekomendasi Penelitian Mahasiswa	Surat Keterangan dari Fakultas/Perguruan Tinggi	30 Menit	Gratis	

Sumber Data: Kepala Urusan Umum Nagari Ujung Gading 2017

4.2. Kontribusi-Kontribusi Pembanguna Nagari

Pemerintah Nagari dengan jumlah kejurongan yang besar bukanlah suatu yang mudah, karena diperlukan usaha yang lebih untuk terus melakukan komunikasi dalam setiap jorong. Adapun kontribusi yang di capai oleh Nagari ialah:

1. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat

Sistem pelayanan yang telah dilaksanaka pada tahun 2016 terdapat beberapa masalah seperti adanya keluhan dari masyarakat karena terlalu lamanya proses dalam pengurusan surat menyurat dan pelayanan lainnya. Dalam rangka menangani kasus ini pemerintah Nagari Ujung Gading pada tahun 2018 bertindak tegas melakukan perubahan pelayan masyarakat satu pintu, sesuai dengan peraturan Wali Nagari Ujung Gading Nomor 01 Tahun 2017 tentang pelayan satu pintu di kantor Wali

Nagari Ujung Gading, Wali Nagari merenopasi kantor Wali Nagari melalui APB Nagari.

Dengan berfungsinya tersebut diharapkan masalah yang di rasakan masyarakat tidak terjadi lagi, agar masyarakat mudah melakukan urusan apapun di kantor Nagari Ujung Gading.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a. Pembangunan Pasar Nagari

Pasar Ujung Gading mulai dibangun pada tahun 1976 dan terletak dipingir jalan lintas Ujung Gading-Air Bangis yang berupa kios-kios dan los-los yang terbuat dari kayu dan sudah tidak layak dibandingkan dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan penduduk yang menyebabkan ketidak nyamanan bagi konsumen untuk melaksanakan transaksi jual beli. Dimana pengolahan pasar Nagari Ujung Gading berpedoman kepada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 tentang pengolah pasar desa.

Pasar Nagari Ujung Gading merupakan pasar yang aktif setiap hari merupakan potensi untuk di kembangkan menjadi lebih baik lagi dan di kelola oleh pengelola Pasar Nagari Ujung Gading berdasarkan surat keputusan Wali Nagari Ujung Gading Nomor 188.4/31/WN.UG/2017 tentang penetapan pengelolaan pasar Nagari Ujung Gading.

Pentingnya pasar bagi Warga Nagari Ujung Gading sangatlah besar, karena itu setelah pasar Nagari Ujung Gading di perbaiki maka aktifitas masyarakat Nagari Ujung Gading merasa nyaman.

3. Pengembangan Koperasi Gading Saiyo (KSU-GS)

Koperasi Serba Usaha Gading Saiyo adalah Badan Usaha milik Nagari yang didirikan pada tanggal 14 April 2009 sesuai Badan Hukum Nomor: 135/BH/III.19/IV-2009, pengelolaan KSU-GS bergerak dibidang simpan pinjam. Selama dua tahun terakhir dalam proses pengambilan pinjaman terdapat beberapa anggota koperasi yang belum dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo pembayaran, namun dengan adanya kerja keras dari petugas kolektor yang telah ditunjuk melalui pendekatan dan arahan sehingga kredit yang macet dapat diselesaikan.

Dengan adanya KSU-GS maka masyarakat sangat mudah untuk meminjam uang untuk Usaha-usaha kecil-kecilan sehingga tidak menyulitkan masyarakat berpikir mau meminjam uang kemana lagi.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Nagari Ujung Gading merupakan suatu Nagari yang berada di Kabupaten Pasaman barat yang mempunyai kepedulian untuk memperdayakan masyarakat Nagari, seperti meningkatkan sumberdaya manusia. Sehingga dikembangkan beberapa kegiatan belajar masyarakat, antara lain:

a.TPA/TPSA sebanyak 52 yang terbesar di 16 kejurongan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan anak dalam keagamaan dan mensukseskan tamat baca Al quran yang dibuktikan dengan sertifikat pandai baca tulis Al quran.

b.Perpustakaan Nagari, yang dikelola oleh petugas yang telah di tetapkan Tahun 2012 dan 2013, pustaka Nagari mendapatkan bantuan buku dari Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, perpustakaan Nagari memiliki ruangan tersendiri di Kantor Wali Nagari sehingga dapat menampung warga yang berminat dalam dunia membaca.

Dengan adanya fasilitas yang disediakan Nagari maka masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat tentang agama maupun umum.²³

4.3.Analisis

Menurut Adissamsita Rahardjo bahwa pembangunan Nagari merupakan seluruh pembangunan yang berlangsung di Nagari dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta di laksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat gotong-royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari berdasarkan kemampuan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan Nagari/Desa mempunyai makna membangun masyarakat

²³ *Sumber Data Eksepose Nagari Ujung Gading Tahun 2017*

kenagarian dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan Nagari merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan pembangunan nasional.

Prinsip-Prinsip Pembangunan Nagari

1. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat.
2. Dinamis dan berkelanjutan.
3. Menyeluruh, terpadu dan terkordinasi.

Adapun strategi dalam melaksanakan pembangunan Nagari:

1. Strategi pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksud mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat Nagari.

2. Strategi kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk Nagari melalui pelayanan dan meningkatkan program pembangunan sosial yang berkala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan sarana sosial lainnya. Seperti transportasi, pendidikan, tempat-tempat ibadah, dan fasilitas lainnya di Nagari.

3. Strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi masyarakat yang dimaksud untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar guna memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan akibat tidak tersedianya sumber daya itu di Nagari.

Demi tercapainya pembangunan yang berkualitas maka sangat dibutuhkan prinsip-prinsip pembangunan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan. Maka prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintahan dan masyarakat

Kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan demi lancarnya pembangunan. Seperti jawaban Pj. Wali Nagari saat wawancara, beliau mengatakan: "kewajiban antara masyarakat dan pemerintah Nagari sangat seimbang, dimana masyarakat membayar pajak dan pemerintah melaksanakan pembangunan". Dan diperjelas kepala urusan pembangunan Nagari Ujung Gading beliau mengatakan: "tanpa pajak dari masyarakat mungkin program-program yang telah dibuat tidak akan berjalan sesuai rencana karena dari pajak masyarakatlah pembangunan bisa terlaksana. Sedangkan masyarakat mengatakan:" menurut saya

kewajiban kewajiabn pemerintah dan masyarakat sangat serasi karna saya merasa pada yang saya bayarkan tidak sia-sia”.²⁴

2.Dinamis dan berkelanjutan

Pembangunan yang dinamais dan berkelanjutan menunjukkan perkembangan atau kemajuan suatu daerah. Kepala urusan pembangunan Nagari Ujung Gading mengatakan:” pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Nagari dengan berkelanjutan, karna mengingat biaya yang tidak memadai jika pembangunan dilaksanakan sesara utuh atau keseluruhan, contohnya pembangunan drainase dilaksanakan secara bertahap”. Dan diperjelas dari jawaban masyarakat, yang diman masyarakat mengatakan:” menurut pengamatan saya pembangunan yang dilaksanakan di Nagari Ujung Gading memamng secara berkelanjutan seperti tahun ini dilaksanakan di jorong Brastgi sementara tahun depan dilaksanakan di jorong lainnya.

3.Menyeluruh, terpadu, dan terkordinasil

Pembangunan yang menyeluruh dan terkordinasi sangat menunjang perkembangan suatu daerah salainkan itu pembangunan yang terkordinasi membuat laporan lebih trasparan.Pj. Wali Nagari mengatakan bahwa:” bahwa pembangunan yang dilksanakan di Nagari Ujung Gading sangat terkordinasi dimana ada lembaga BAMUS yang mengontrol pelaksanaan pembangunan. Sedangkan masyarakat

²⁴Hasil Wawancara dengan Padri Lubis, (Pj. Wali Nagari) dan masyarakat,kantor nagari Ujung Gading, 04-10-2018

mengatakan:” pembangunan sangat terpadu dan menyeluruh, itu terbukti pembangunan yang sama dilaksanakan di setiap kejurongan seperti pembangunan jalan rabat beton disetiap gang yang ada di Nagari Ujung Gading”.

Selainkan prinsip-prinsip strategi dalam melaksanakan pembangunan sangat dibutuhkan demi terlaksananya pembangunan sesuai yng telah direncanakan, adapun strategi dalam melaksanakan pembangunan:

1.strategi pertumbuhan

Strategi pertumbuhan difokuskan dalam peningkatan perekonomian, Pj.Wali Nagari mengatakan dalam wawancara:” pemerintahan Nagari membangun sector pertanian dengan memperluas lahan persawahan agar perekonomian masyarakat meningkat”. Dan di perjelas masyarakat yang dimana masyarakat mengatakan pembangunan bendungan yang berasal dari APBN dan dilaksanakan pemerintah Nagari sangat menunjang peningkatan pendapatan pertanian”.

2.strategi kesejahteraan

Pj. Wali Nagari mengatakan:” strategi kesejahteraan pembangunan sarana para sarana dan perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan menjadi fokus utama pembangunan di Nagari Ujung Gading”.

3.strategi tangkap terhadap kebutuhan masyarakat

Menurut kepala urusan pembangunan yang dimana beliau mengatakan:” strategi yang dilakukan pemerintah Nagari tangkap terhadap kebutuhan masyarakat

dengan melaksanakan survei langsung kelapangan dan membuat kota pos pengaduan atas keluhan masyarakat dalam pembangunan”. Diperjelas oleh masyarakat bahwa:” dengan adanya kotak pos pengaduan membuat saya sebagai masyarakat merasa lebih leluasa dalam menyamakan keluhan yang saya rasakan”.²⁵

Lembaga yang ada di Nagari Ujung Gading Seperti BAMUS, KAN, PKK, BUNDO KANDUONG, sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading. Seperti yang dijelaskan bapak Kepala Urusan Pembangunan Nagari Ujung Gading “ lembaga BAMUS mempunyai tugas mengawasi pembangunan membimbing dan menindak lanjuti pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Nagari” dan diperjelas bapak Pj. Wali Nagari “ tanpa lembaga-lembaga yang ada di Nagari pembangunan menurut saya tidak akan berjalan sesuai rencana karna pengawasan dari luar atau BAMUS sangat menunjang dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Nagari, sehingga peran lembaga Nagari terkhusus BAMUS sangat diperlukan dalam menindak lanjuti pembangunan”.

Terlihat jelas perbedaan peran lembaga yang ada di Nagari Ujung Gading dan Nagari lainnya seperti lebih banyak pembangunan di laksanakan di Nagari ujung Gading dan lebih terstruktur, karena di Nagari Ujung Gading kerja sama antara lembaga-lembaga di Nagari dan pemerintahan Nagari sangat kuat. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Pj. Wali Nagari Ujung Gading “ dipasaman barat pada tahun

²⁵ Hasil Wawancara dengan Safaruddin (Kepala Urusan Pembangunan) dan masyarakat Kantor Nagari Ujung Gading 04-10-2018

2017 pemerintahan Nagari Ujung Gading memperoleh penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2005 s/d 2015 pada tingkat kabupaten Pasaman Barat, dari prestasi ini terlihat perbedaan laporan keuangan pembangunan Nagari Ujung Gading lebih transparan ketimbang Nagari yang lain”. Dan sementara menurut bapak Kepala Urusan Pembangunan Nagari Ujung Gading “ perbedaan pembangunan di Nagari Ujung Gading dengan Nagari yang lain di buktikan dengan pemberian anggaran dari APBD Kabupaten Pasaman Barat lebih besar dari Nagari yang lain”²⁶.

²⁶ Hasil Wawancara dengan, Pj. Wali Nagari Padri Lubis dan Kepala Urusan pembangunan Nagari ujung gading Safaruddin, Kantor Nagari Ujung Gading, 04-10-2018

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, pembangunan yang terjadi di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, peran lembaga Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading. Pembangunan sangat signifikan dikarenakan pembangunan di Nagari Ujung Gading berdasarkan teori prinsip-prinsip pembangunan yang dikemukakan Tjahja Supriatna sudah sesuai dengan yang terjadi dilapangan walaupun tidak sempurna teori tersebut namun kekurangannya tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Pembangunan Nagari Ujung Gading di tujukan untuk mempercepat pembangunan insfratruktur, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang sejatera.

5.2. Saran

- a. Agar pemerintahan Nagari lebih meningkatkan pelayanan dari pelayanan yang sebelumnya

- b. Agar aparat pemerintahan Nagari lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.

- c. Agar aparat pemerintah lebih melengkapi data yang ada di Nagari Ujung Gading dan mendesain kembali biro/meja aparatur sehingga terlihat rapi dan bekerja dengan nyaman.
- d. Agar aparat pemerintahan lebih meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

DAFTAR PUSTAKA

- AdiSasmita Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006. Jakarta, 1987.
- Gulo W, *Metode Penelitian*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Jujun Surya Sumantri, *Filsafat Ilmu, Sinar Harapan*, Jakarta, 2002.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan pembangunan*. Gramedia, Jakarta, 1974.
- Lubis Hari.S.B dan Martani Husaini, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Jakarta, 1997
- Muhammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1999.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Syahyuti, *Konsep Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2006. Sugiyono
- Thoha Miftah, *pemimpin dan Kepemimpinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tjahja Supriatna, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Badan pendidikan dan pelatihan departemen dalam negeri, Jakarta, 1997.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, tarsito, Bandung, 2005.

Sumber lain :

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 5 tahun 2016 tentang sistem pengelolaan pembangunan partisipatif daerah.

Hasil Wawancara dengan Pj. Wali Nagari Padri Lubis dan Kepala Urusan Pembangunan Safaruddin di Kantor Nagari Ujung Gading 04-10-2018.

Hasil Wawancara dengan Pj. Wali Nagari Padri Lubis dan Masyarakat di Kantor Nagari Ujung Gading 04-10-2018.

Hasil Wawancara dengan Safriddin Kepala Urusan Pembangunan dan Masyarakat di Kantor Nagari Ujung Gading 04-10-2018.

Isian Monografi Nagari Ujung Gading Tahun 2017.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Tentang desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa.

Profil Nagari Ujung Gading Tahun 2018

Q.S. Al Imron Ayat 195 Tentang Musawarah.

Q.S. Assu'ara Ayat 151-152 Pembangunan.

Sumber Data Nagari Ujung Gading Tahun 2017.

Lampiran 1

1. Bagai mana peran lembaga meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading ?
2. Apa perbedaan Nagari Ujung Gading dan Nagari lain dalam bidang pembangunan ?
3. Bagai mana strategi pertumbuhan pembangunan di Nagari Ujung Gading ?
4. Bagai mana strategi kesejateraan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading ?
5. Bagai mana strategi tangkap terhadap kebutuhan masyarakat Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Ujung Gading ?
6. Apakah pembangunan di Nagari Ujung Gading dinamis dan berkelanjutan?
7. Apakah pembangunan di Nagari Ujung Gading menyeluruh, terpadu, dan terkordinasi?
8. Apakah kewajiban serasi antara pemerintahan dan masyarakat dalam bidang pembangunan di Nagari Ujung Gading ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Harja Wardoyo
2. Nim : 44143001
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Gading, 12 September 1994
4. Pekerjaan : Mahasiswa UIN-SU
5. Alamat : Jalan Bersama, Gang Saudara

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD NEGERI 18 SUMBA Berijazah Tahun 2007
2. Tamatan MADRASAH SWASTA MUSTHAFAWIYA PURBA BARU
2010
3. Tamatan MADRASAH ALIYAH MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU
2013

DOKUMENTASI



❖ Wawancara dengan PJ Wali Nagari Ujung Gading Bapak Padri Lubis



❖ Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Bapak Yunaldi



❖ Wawancara dengan kepala urusan pembangunan bapak Safruddin, S. Pd.I



❖ Kantor Wali Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kab. Pasbar



❖ Wawancara dengan warga Ujung gading Ibuk Simas



❖ Wawancara dengan kaur pembangunan sekaligus Datuk Kanaya Nagari Ujung Gading



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI UJUNG GADING TAHUN ANGGARAN 2018



I. PENDAPATAN	Rp. 8.767.756.766,-
1. PENDAPATAN ASLI NAGARI	Rp. 62.338.920,-
2. BAGI HASIL BUMNAG NAGARI	Rp. 15.000.000,-
3. DANA DESA	Rp. 2.838.442.000,-
4. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp. 150.318.500,-
5. ALOKASI DANA NAGARI	Rp. 5.600.056.337,-

II. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	Rp. 9.566.557.223,-
A. PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TURJANGAN	Rp. 884.550.000,-
B. KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR NAGARI	Rp. 751.475.231,-
C. KEGIATAN OPERASIONAL BAKUM NAGARI	Rp. 122.655.240,-
D. KEGIATAN SELEKSI PERANGKAT NAGARI	Rp. 2.500.000,-
E. KEGIATAN PENATAAN NAGARI	Rp. 1.800.000.000,-
F. KEGIATAN PEMILIHAN WALI NAGARI	Rp. 90.000.000,-
G. KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEKASAN TAPAL BATAS	Rp. 24.935.000,-
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	
A. KEGIATAN PENGADAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN SARPRAS (LINGKUNGAN PERUMAHAN)	Rp. 600.000.000,-
B. KEGIATAN PENGADAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN SARPRAS (TRANSPORTASI)	Rp. 1.120.000.000,-
C. KEGIATAN PENGADAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN SARPRAS KESEHATAN	Rp. 609.900.000,-
D. KEGIATAN PENGADAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN SARPRAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp. 420.000.000,-
E. KEGIATAN PENGADAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN GEBUG KANTOR PEMERINTAH NAGARI	Rp. 500.000.000,-
F. KEGIATAN PENGADAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN SARPRAS UJAH BAGA	Rp. 400.000.000,-

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
A. KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT/ KAN	Rp. 75.000.000,-
B. KEGIATAN PEMBINAAN Penguatan Kelembagaan Perempuan/ PKK	Rp. 50.000.000,-
C. KEGIATAN PEMBINAAN Kelembagaan Bundo Kahduang	Rp. 30.000.000,-
D. KEGIATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Rp. 220.200.000,-
E. KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETERTAMAMAN WILAYAH	Rp. 50.000.000,-
F. KEGIATAN PEMBINAAN FASILITASI PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI	Rp. 10.200.000,-

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. PENGELOLAAN KEGIATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 751.932.000,-
B. PENGELOLAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp. 219.650.000,-
C. PENGELOLAAN KEGIATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp. 62.299.370,-
D. PENGINJILAN DAN PENGEMBANGAN BUMNAG	Rp. 15.577.134,-
E. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Rp. 36.110.000,-
F. BANTUAN STIMULAN	Rp. 300.000.000,-
G. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NAGARI	Rp. 3.250.000,-
H. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	Rp. 65.375.000,-
I. PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN LPMN/ KPMN	Rp. 36.750.000,-
J. PELATIHAN KERJA DAN KETERAMPILAN MASYARAKAT NAGARI	Rp. 140.910.000,-
K. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR NAGARI DAN BAKUM	Rp. 170.566.240,-

5. BIDANG TIDAK TERUGA	Rp. 2.722.000,-
6. PEMBIAYAAN	
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN (SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA)	Rp. 898.800.450,-
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL BUMNAG)	Rp. 100.000.000,-

PENGUNAAN DANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Rp. 300.000.000,-	DDS	12. PEMBANGUNAN BADAN JALAN PERTAMAAN JALAN ISAM JAWO JR. KOTO SAHAI	Rp. 100.000.000,-	SBL
2. DRAENASE JALAN SUJIVESI JR. TANJUNG BAKI	Rp. 100.000.000,-	DDS	13. PEMBANGUNAN KANTOR DAN RUANG UKS PAUD JR. SARINHA	Rp. 100.000.000,-	
3. DRAENASE JALAN LINGKAR KE AIR BARAT	Rp. 200.000.000,-	DDS	14. PEMBANGUNAN POLINDOS KOTO RAJU JR. KOTO SAHAI	Rp. 150.000.000,-	
4. BETON KE PISTU PARLAKSIAN JR. SITIAK BARAT	Rp. 150.000.000,-	DDS	15. PEMBANGUNAN JAMBAN	Rp. 296.400.000,-	
5. PENINGKATAN JALAN USAHA TANI JR. BATANG GUNUNG	Rp. 200.000.000,-	DDS	16. PEMBANGUNAN PANGSIRAS JR. SARINHA	Rp. 24.500.000,-	ADN
6. LANJUTAN PEMBUKAAN JALAN WISATA MIARO PANGGUNG JR. SITIAK	Rp. 200.000.000,-	DDS	17. PEMBANGUNAN PANGSIRAS JR. KOTO PINANG	Rp. 25.000.000,-	ADN
7. LANJUTAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI PASIR PUTIH-ASOM JAWO JR. KOTO SAHAI	Rp. 47.000.000,-	ADD/ADN	18. PEMBANGUNAN PAUD/ TK PERTIWI JR. PASAR LAMA	Rp. 320.000.000,-	
8. PEMBUKAAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI JR. LOMBOK	Rp. 125.000.000,-	ADD/ADN	19. WAKANA PERMAINAN ANAK PAUD/ TK	Rp. 100.000.000,-	
9. PEMBUKAAN DAN PENINGKATAN JALAN UJUNG TANJUNG JR. RANAH SALIDO	Rp. 125.000.000,-	ADD/ADN	20. RENOVASI PEMBANGUNAN GEBUG KANTOR WALI NAGARI	Rp. 500.000.000,-	ADN
10. PENINGKATAN JALAN USAHA TANI ULU BONDAR JR. BRASTAGI	Rp. 48.000.000,-	ADD/ADN	21. PEMBANGUNAN PAGAR LAPANGAN BOLA KAKI JR. PASAR LAMA	Rp. 200.000.000,-	
11. PEMBUKAAN DAN PENINGKATAN JALAN AMPERA- BATANG GUNUNG JR. KOTO PINANG	Rp. 125.000.000,-	ADD/ADN	22. PEMBANGUNAN TRUBUN GOR MINI BOC AIR BAYANG JR. KOTO PINANG	Rp. 200.000.000,-	SAL